

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Siklus Akuntansi

Menurut Soemarso (2009) Siklus Akuntansi adalah Tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksinya sampai dengan dibuatnya laporan keuangan

Kegiatan pencatatan akuntansi meliputi :

1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
2. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
3. Pemindahbukuan ke dalam buku besar (*posting*).
4. Pembuatan neraca saldo (*trial balance posting*).
5. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*).
6. Penyusunan laporan keuangan (*financial statement*).
7. Pembuatan jurnal penutup (*closing entries*).
8. Pembuatan neraca saldo penutup (*post closing trial balance*).
9. Pembuatan jurnal balik (*reversing entries*).

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.1 Pengertian UMKM

Wijoyo (2021) menyebutkan bahwa pengertian UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang di kelola oleh orang-perorangan atau berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau juga mikro. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh seorang individu dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersihnya tidak lebih Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau penghasilan penjualannya sebanyak banyaknya Rp300.000.000,00 tiap tahun.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh seorang individu dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersihnya diatas Rp50.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau penghasilan penjualannya diatas Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 tiap tahun.
3. Usaha menengah adalah adalah usaha produktif yang dimiliki oleh seorang individu dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersihnya diatas Rp500.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau penghasilan penjualannya diatas Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 tiap tahun.

2.2.2 Tarif Pajak UMKM

Tarif Pajak yang dikenakan bagi para pelaku UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa tarif pajak sebesar 0,5% dan bersifat final. Tarif tersebut berlaku efektif mulai 1 Juli 2018 dengan syarat penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pospos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode (Kasmir, 2013). Kemudian menurut PSAK No. 1, *“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”* (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011).

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Maith, 2013). Selanjutnya, dalam PSAK No. 1, tujuan laporan

keuangan adalah guna memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam PSAK No.1 disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus memuat informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Inti dari tujuan laporan keuangan tersebut adalah sebagai alat bantu bagi pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat taksir apakah entitas akan dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian.

2.4 SAK EMKM

2.4.1 Pengertian SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, atau pendeknya disebut SAK EMKM standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk kriteria entitas mikro, kecil, dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang telah disebutkan di atas.

Kemudian, dalam paragraf 1.3 disebutkan bahwa SAK ini boleh digunakan oleh entitas yang belum memenuhi definisi dan kriteria pada paragraf 1.2 di atas apabila pihak yang berwenang memperbolehkan penggunaan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM yaitu untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

Pengguna yang dimaksud dalam tujuan tersebut di atas termasuk pemasok sumber daya bagi entitas, seperti pemberi utang dan investor. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan tanggung jawab manajer atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Selain itu, laporan-laporan yang disyaratkan di SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan yaitu:

- a. Laporan laba rugi selama periode;

Laporan laba rugi menurut (Sirait, 2014) merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui, perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2010).

Sugiono (2016) juga menyebutkan Laporan laba rugi adalah laporan ringkas tentang jenis dan jumlah pendapatan atau hasil penjualan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, biaya masa itu dan keuntungan atau kerugian yang diderita selama periode tersebut (misalnya; satu bulan, per kuartal, per tahun, dsb). Kemudian Irwandi (2018) menyatakan bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi mengenai pendapatan, beban dan laba rugi suatu entitas selama suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai hasil bersih entitas, sama dengan jumlah laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang selama ini dikenal. Selain itu, Irwandi juga mengatakan bahwa laporan laba rugi dapat disusun dalam bentuk *single step* ataupun *double step*.

Dalam SAK EMKM, laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan kinerja dari entitas selama satu periode. Akun-akun seperti akun pendapatan, beban keuangan, maupun beban pajak dalam satu periode disajikan dalam laporan laba rugi ini. Sesuai syarat SAK EMKM, semua pendapatan dan beban dicantumkan dalam laporan kecuali dinyatakan lain, seperti perubahan kebijakan atau.

b. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut Laporan posisi keuangan melaporkan nilai aset, nilai liabilitas, dan nilai ekuitas pada tanggal

tertentu. Laporan posisi keuangan juga dapat menunjukkan nilai net aset perusahaan. Sederhananya, posisi keuangan diartikan sebagai berikut.

$$\text{Total Aset} = \text{Total Liabilitas} + \text{Total Ekuitas}$$

Dalam SAK EMKM, laporan posisi keuangan merupakan laporan yang berisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas yang terdapat pada laporan posisi keuangan ini yaitu seperti akun kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang bank, utang usaha, dan ekuitas. SAK EMKM tidak mengatur penyajian secara formal namun entitas dapat menyajikan sesuai klasifikasi (aset lancar dan aset tidak lancar pada sisi debit; liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas pada sisi kredit).

c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) menurut SAK EMKM (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) harus memuat:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM;
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi;
3. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.4.2 Kebijakan Akuntansi Menurut SAK EMKM

Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan. (Hendriksen, 1996).

PSAK 25 menyebutkan “Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.” Dalam hal ini, semua entitas wajib menerapkan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai acuan dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan, tak terkecuali entitas mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan akuntansi untuk entitas mikro, kecil, dan menengah diatur dalam SAK EMKM. Apabila transaksi, kejadian, dan keadaan akuntansi lainnya diatur dalam SAK EMKM secara khusus, maka setiap entitas wajib menyampaikannya sesuai dengan peraturan yang disebutkan dalam SAK EMKM. Namun, apabila SAK EMKM tidak mengatur kejadian atau transaksi atas peristiwa akuntansi tersebut secara khusus, maka entitas harus merujuk dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban.

a. Pengakuan

Pembentukan suatu akun dalam laporan, baik laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan, yang memenuhi definisi unsur yang diuraikan dalam

paragraf 2.2 dan 2.8 pada bab 2 SAK EMKM merupakan pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan ini juga memiliki syarat, yaitu:

1. manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan
2. akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Berikut prinsip pengakuan yang diterapkan pada unsur-unsur laporan keuangan yang disebutkan pada SAK EMKM:

1. Aset

Pengakuan aset dilakukan ketika aset diperkirakan memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan biaya yang dikeluarkan atas aset tersebut dapat dihitung dengan andal. Apabila aset tersebut diperkirakan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan namun telah terdapat biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut, maka biaya tersebut dapat diakui sebagai beban.

2. Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas dalam laporan posisi keuangan diakui ketika akan terdapat pengeluaran yang dapat menyelesaikan kewajiban di masa yang akan datang dan dapat dihitung secara andal. Ekuitas dapat diakui apabila entitas mendapat setoran berupa kas, setara kas, ataupun aset nonkas.

3. Pendapatan

Pengakuan pendapatan dilakukan apabila terdapat hak atas pembayaran yang telah diterima atau masih harus diterima, baik pada masa sekarang, maupun pada masa yang akan datang.

4. Beban

Pengakuan beban terjadi apabila terdapat pekerja yang memberikan jasa kepada entitas yang kemudian harus dibayar pada periode terjadinya pemberian jasa. Beban juga diakui ketika terjadi penurunan masa manfaat ekonomi atas suatu aset atau kenaikan utang di masa depan yang dapat diukur secara andal.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah “proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan.” (Putra, 2018). Pokok pengukuran menurut SAK EMKM yaitu biaya yang timbul sejumlah kas dan setara kas yang diberikan untuk mendapatkan aset, atau biaya sebesar kas dan setara kas yang akan diterima atau dibayarkan untuk melaksanakan liabilitas. Biaya tersebut disebut biaya historis.

Berikut prinsip pengukuran yang diterapkan pada unsur-unsur laporan keuangan yang disebutkan pada bab 2 SAK EMKM:

1. Aset

Aset, baik aset lancar maupun aset tetap, diukur menggunakan biaya perolehannya. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Misal biaya yang dikeluarkan untuk meratakan tanah agar siap pakai.

Untuk persediaan, pada SAK EMKM, entitas diperbolehkan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO) atau rata-rata tertimbang dalam penentuan biaya persediaannya. Khusus untuk aset tetap selain tanah,

pengukuran periode selanjutnya setelah pengukuran awal adalah biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya.

2. Liabilitas dan Ekuitas

Sesuai dengan SAK EMKM paragraf 13.4, pengukuran liabilitas adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Sedangkan, pengukuran ekuitas, baik berupa kas, setara kas, atau nonkas yang disetorkan, diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendapatan

Pendapatan diukur sebesar jumlah bruto yang diterima atau yang akan diterima, dikurangi dengan hak pihak lain seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, pajak pertambahan nilai.

Dalam penjualan barang pihak lain melalui entitas, pendapatan yang diakui hanya sebesar komisi yang didapat oleh entitas.

4. Beban

Beban diukur berdasarkan berapa yang dibayarkan kepada pekerja yang memberikan jasa kepada entitas. Beban tersebut diukur sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayarkan sebagai imbalan atas jasa para pekerja. Kemudian, untuk pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan masa sewa. Untuk pendapatan yang tidak dapat dihitung secara handal, maka pengakuan dilakukan saat kas diterima, dan beban diakui saat kas dibayarkan.

c. Penyajian

Laporan keuangan disyaratkan untuk disajikan secara wajar. Penyajian wajar ini berarti menyajikan secara jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Tujuan penyajian wajar laporan keuangan yaitu untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kriteria sesuai SAK EMKM, yaitu disajikan secara relevan, representasi tepat, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Apabila persyaratan dalam SAK EMKM tidak memadai bagi entitas untuk mengetahui pengaruh atas transaksi, kejadian, dan keadaan lainnya terhadap laporan keuangan, maka diperlukan pengungkapan.

Untuk akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas disajikan dalam laporan posisi keuangan, sedangkan untuk pendapatan dan beban disajikan dalam kelompok pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi.